

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN**

Drs. SOEROSO, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP.19640921 198803 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan ke pemerintahan yang baik (good governance).

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 230.140.599.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.218.719.755.450,- (95,11%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 11 (sebelas) program dengan 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan.

Dinas Pendidikan sesuai dengan misi yang diemban dalam bidang pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain melalui penyediaan anggaran bantuan biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada setiap satuan pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan antara lain membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Tenaga Penddidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bakat prestasi siswa serta pembentahan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3. Gambaran Organisasi	
1.3.1 Dasar Pembentukan, Tugas dan Fungsi	5
1.3.2 Struktur Organisasi	7
1.3.3 Sumber Daya Manusia	8
1.4 Isu Strategis	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Tujuan dan Sasaran	14
2.4 Indikator Kinerja Utama	17
2.5 Perjanjian Kinerja 2018	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	20
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	25
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN :	
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	
Perjanjian Kinerja Perubahan 2018	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota

Pekalongan Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Dasar Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5), selanjutnya dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan disebutkan bahwa, Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dindik adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pendidikan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan;
- d. pengkoordinasian pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan;
- e. pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional pendidik dan kependidikan non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan serta pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
- g. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
- h. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal ataupun non formal;
- i. pembinaan dan pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan;
- j. penyusunan pedoman, pelaksanaan, dan evaluasi kompetisi peserta didik, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional;
- k. pembinaan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan;
- l. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah;
- m. pengawasan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- n. pengawasan dan pembinaan pelayanan perpustakaan sekolah dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM);
- o. pengkoordinasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan;

- p. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- q. pembinaan pengeloaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- r. pengkordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1.) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2.) Sub Bagian Keuangan;
 - 3.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1.) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SD;
 - 2.) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SMP;
 - 3.) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, terdiri dari :
 - 1.) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan PAUD;
 - 2.) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan PNF;
 - 3.) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1.) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF;
 - 2.) Seksi Sarana dan Prasarana SD;
 - 3.) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 - 1.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;
 - 2.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 - 3.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri atas:

- 1.) Jabatan Fungsional Pengawas SD;
- 2.) Jabatan Fungsional Pengawas SMP;
- 3.) Jabatan Fungsional Pengawas TK/PAUD;
- 4.) Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Non Formal
- 5.) Jabatan Fungsional Guru.

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan Kota didukung oleh 104 (seratus empat) orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.3.1
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Kepala Seksi	12
6.	Pengawas SMP	2
7.	Pengawas SD	6
8.	Pengawas PAUD/TK	4
9.	Penilik PLS	1
10.	Pranata Komputer	1
11.	Pelaksana PNS	45
12.	Pelaksana Non PNS	24
	Jumlah	104

Tabel 1.3.3.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I / IV.b	10
2.	Pembina / IV.a	16
3.	Penata Tingkat I / III.d	8
4.	Penata / III.c	12
5.	Penata Muda Tingkat I / III.b	10
6.	Penata Muda / III.a	7
7.	Pengatur Tingkat I / II.d	5
8.	Pengatur / II.c	4
9.	Pengatur Muda Tingkat I/II.b	0
10.	Pengatur Muda	8
	Jumlah	80

Tabel 1.3.3.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS
1.	S2	11	-
2.	S1	40	7
3.	D3	10	5
4.	D2	-	-
5.	D1	-	-
6.	SLTA	16	11
7.	SLTP	2	1
8.	SD	1	-
	Jumlah	80	24

Tabel 1.3.3.4
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia

NO.	Usia	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	56 tahun lebih	21		21
2.	51-55 tahun	20	1	21
3.	46-50 tahun	10	3	13
4.	41-45 tahun	10	1	11
5.	36-40 tahun	12	4	16
6.	31-35 tahun	7	5	12
7.	26-30 tahun		4	4
8.	18-25 tahun		6	6
	Jumlah	80	24	104

1.4 Isu Strategis

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam masa tumbuh kembang anak;
2. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peningkatan akses layanan pendidikan dengan lebih memperhatikan pemerataan tingkat partisipasi sekolah;
4. Penambahan Unit Sekolah Baru dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, rasio ketersediaan sekolah, dan pemerataan tingkat partisipasi sekolah;

5. Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan disertai upaya penyelenggaraan pendidikan yang lebih terjangkau;
6. Pengembangan pendidikan ketrampilan disertai dengan penumbuhan jiwa kewirausahaan kreatif;
7. Peningkatan kualitas pendidikan budi pekerti didukung tata kehidupan masyarakat sekolah yang berakhhlak mulia;
8. Peningkatan akses layanan pendidikan melalui pemberian beasiswa;
9. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki serta menyelaraskan dengan kebutuhan pasar;
10. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI);
11. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal S1/D4 dan linear dengan bidang tugasnya, khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI;
12. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan Mutu Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan;

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2017 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi Landasan Hukum, Tugas dan Fungsi Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini berisi Rencana Strategis, Target IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 050/A.2/2308.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah Kota Pekalongan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan dari Dinas Pendidikan adalah :

1. Meningkatkan layanan PAUD yang merata dan bermutu;
2. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar yang merata dan bermutu;
3. Meningkatkan layanan Pendidikan Non Formal yang merata dan bermutu;
4. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan mutu, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi;
6. Membentuk kepribadian peserta didik yang berkarakter.

b. Sasaran

Sasaran dari Dinas Pendidikan adalah :

1. Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan PAUD;
2. Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan Pendidikan Dasar;
3. Meningkatnya mutu dan lulusan Pendidikan Dasar;
4. Meningkatnya akses dan layanan ketersediaan Pendidikan Non Formal;
5. Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Meningkatnya mutu tata kelola organisasi;
7. Meningkatnya mutu tata kelola satuan pendidikan;
8. Terbentuknya kepribadian peserta didik yang beriman, bertaqwah dan berakhlik mulia.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan :

Tabel IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018

NO	INDIKATOR	RUMUS	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan PAUD								
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 - 6 th	Jumlah seluruh siswa PAUD usia 3-6 th Jumlah penduduk usia 3-6 tahun	49,50%	50,00%	50,50%	51,00%	51,50%	52,00%
Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan Pendidikan Dasar								
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun	Jml penduduk usia sekolah 7-12 th yang sekolah Jml penduduk usia sekolah 7-12 th	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun	Jml penduduk usia sekolah 13-15 th yang sekolah Jml penduduk usia sekolah 13-15 th	99,95%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Angka Melanjutkan ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru SMP/MTs th pelajaran berjalan Jumlah lulusan SD/MI th pelajaran sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru SMA/SMK/MA th pelajaran berjalan Jumlah lulusan SMP/MTs th pelajaran sebelumnya	98,47%	98,48%	98,48%	98,49%	98,49%	98,50%
Sasaran 3 : Meningkatnya mutu dan lulusan Pendidikan Dasar								
6	Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI	Jumlah Seluruh Nilai Ujian Sekolah/Madrasah Jumlah Seluruh Peserta Ujian SD/MI	6,75	6,80	6,85	6,90	6,95	7,00
7	Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah Seluruh Nilai Ujian Nasional SMP/MTs Jumlah Seluruh Peserta Ujian SMP/MTs	7,05	7,10	7,15	7,20	7,25	7,30
Sasaran 4 : Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan PNF								
8	Persentase penduduk usia	Jml penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan	37,50%	40,00%	47,50%	50,00%	52,50%	60,00%

NO	INDIKATOR	RUMUS	TARGET KINERJA PADA TAHUN							
	sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	<u>kesetaraan</u> Jml penduduk usia sekolah yang tidak sekolah								
9	Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	<u>Jumlah anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan</u> Jumlah anak putus sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sasaran 5 : Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;									
10	Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi	<u>Jumlah guru memiliki sertifikasi profesi</u> Jumlah seluruh guru	53,49%	54,27%	55,05%	55,83%	56,61%	57,39%		
	Sasaran 6 : Meningkatnya mutu tata kelola organisasi;									
11	Persentase capaian Kinerja	<u>Jumlah persentase realisasi capaian</u> <u>indikator kinerja</u> Banyaknya indikator kinerja	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
	Sasaran 7 : Meningkatnya mutu tata kelola satuan pendidikan;									
12	Persentase capaian SPM pendidikan dasar	<u>Jumlah Indikator SPM yang Tercapai</u> Jumlah Seluruh Indikator SPM	55,56%	59,26%	62,96%	66,67%	70,37%	74,07%		
	Sasaran 8 : Terbentuknya kepribadian peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhlaq mulia;									
13	Persentase pembelajaran pendidikan agama	<u>Jumlah sekolah yang menerapkan</u> <u>pembelajaran pendidikan agama</u> Jumlah seluruh sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.4 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberi amanah/tanggungjawab. Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Manfaat dari Perjanjian Kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2018 terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018. Berikut adalah Perjanjian Kinerja di bidang pendidikan Tahun 2018 dengan uraian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 - 6 th	50,50%
2	Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun	100%
3		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun	100%
4		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs	100%
5		Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA	98,48%
6	Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar	Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI	6,85
7		Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs	7,15
8	Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF	Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	47,50%
9		Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	100%
10	Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi	57,68%
11	Meningkatnya Mutu Tata Kelola Organisasi	Persentase capaian Kinerja	80%
12	Meningkatnya Mutu Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan dasar	62,96%
13	Terbentuknya Kepribadian Peserta Didik yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlaq Mulia.	Persentase pembelajaran pendidikan agama	100%

Rencana Penganggaran

1. Program

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Percentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

Capaian IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir RPJMD/Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
1	Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 - 6 th	50,50%	56,10%	111,09%	52,00%	107,88%
2	Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun	100%	106,79%	106,79%	100%	106,79%
3		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun	100%	103,24%	103,24%	100%	103,24%
4		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs	100%	101,68%	101,68%	100%	101,68%
5		Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA	98,48%	116%	117,79%	98,50%	117,76%
6	Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar	Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI	6,85	72,64	106,04%	7,00	103,77%
7		Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs	7,15	57,36	80,22%	7,30	78,57%
8	Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF	Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	47,50%			60,00%	
9		Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	100%			100%	
10	Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi	55,05%	55,20%	100,27%	57,39%	96,18%
11	Meningkatnya Mutu Tata Kelola Organisasi	Persentase capaian Kinerja	80%			80%	
12	Meningkatnya Mutu Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan dasar	62,96%	68%	108 %	74,07%	91,80%
13	Terbentuknya Kepribadian Peserta Didik yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlaq Mulia.	Persentase pembelajaran pendidikan agama	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ada yang melebihi target, sama dengan target dan kurang/tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

- sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja utama yaitu indikator APK PAUD 3-6 Tahun, indikator APS 7-12 Tahun, indikator APS 13-15 Tahun, indikator Angka Melanjutkan ke SMP/MTs, indikator Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA, indikator Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI, indikator Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi dan indikator Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar capaian kinerjanya melebihi target.
- Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase pembelajaran pendidikan agama
- Capaian kinerja yang tidak mencapai target ditunjukan pada indikator Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya dan target sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis Capaian Sasaran 1

Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PAUD

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi			
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 - 6 th	47,05%	60,38%	50,50%	56,10%	111,09	52,00%	107,88
Rata-rata Capaian Kinerja						111,09		

Berdasarkan tabel diatas indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 tahun sesuai target Renstra 2016-2021 ditargetkan mencapai 50,50 %. Dari target tersebut tahun 2018 berhasil tercapai sebesar 56,10% dengan capaian kinerja sebesar 111,09% atau interpretasi sangat baik, Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang positif. Pencapaian tersebut tak lepas dari sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan bersama Bunda PAUD Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan kepada lembaga PAUD tentang pentingnya akreditasi lembaga PAUD Formal sehingga meningkatkan mutu pendidikan PAUD Formal di Kota Pekalongan, selain itu juga dilakukan pendataan anak usia dini yang belum masuk PAUD sehingga diharapkan pada tahun 2019 semua anak usia dini bisa mengikuti pendidikan anak usia dini dan berdampak pada peningkatan jumlah murid PAUD Formal.

Pencapaian target indikator APK PAUD 3-6 tahun didukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp. 2.720.150.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.527.607.173,- (92,92%).

Program Pendidikan Anak Usia Dini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Realisasi 2018
			Satuan	Angka	
1	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah TK mendapat bantuan rehab pagar	TK	1	1
2	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab	Ruang	36	36
		Jumlah ruang kelas baru PAUD yang dibangun	Ruang	1	1
3	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Cabang Lomba kelembagaan dan pengelolaan PAUD yang dipertandingkan	Lomba	3	3
4	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta sosialisasi kurikulum PAUD dan pendidikan karakter	Orang	680	568
		Jumlah kurikulum baru yang dikembangkan	Kurikulum	1	1
5	Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD terfasilitasi pendidikan inklusinya	Lembaga	4	4
6	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah guru PAUD peserta diklat berjenjang	Guru PAUD	80	80
7	Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal	Jumlah pengadaan whiteboard Jumlah pengadaan printer scanner Jumlah pengadaan laptop Jumlah PAUD yang mendapat bantuan perlengkapan kantor, peralatan dapur, mebelier & APE	Buah Unit Unit PAUD	2 1 1 1	2 1 1 1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Realisasi 2018
			Satuan	Angka	
8	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Jumlah lomba anak yang diselenggarakan	Lomba	13	12
9	Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integrative	Jumlah peserta Sosialisasi model pembinaan PAUD Holistik Integratif	Orang	120	120
10	Fasilitasi Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Jumlah Jejaring mitra PAUD yang terfasilitasi	Organisasi	4	4
11	Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Jumlah PAUD Negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan	PAUD Negeri	7	7

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021. Kegiatan strategis yang mendukung capaian indikator program Pendidikan Anak Usia Dini adalah Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal. Kegiatan tersebut mampu meningkatkan APK PAUD Formal.

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, memfasilitasi siswa PAUD berkebutuhan khusus untuk tetap bersekolah di PAUD Formal yang menyediakan pendidikan inklusi bagi anak usia dini di 4 (empat) TK Negeri .

Foto dibawah ini menggambarkan aktivitas siswa PAUD di TK Negeri Pembina Timur dan Utara, anak diajarkan untuk berkreasi dengan kancing baju sebagai alat peraganya, adapun hasil kreativitas siswa dipajang diruang kelas sehingga setiap siswa bisa melihat hasil kreativitas antar siswa.



Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini

Analisis Capaian Sasaran 2
Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi			
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun	103,91%	107,62%	100%	106,79%	106,79	100%	106,79
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun	103,34%	107,09%	100%	103,24%	103,24	100%	103,24
3	Angka Melanjutkan ke SMP/MTs	113,35%	105,08%	100%	101,68%	101,68	100%	101,68
4	Angka Melanjutkan ke SMP/MTs	105,12%	100,78%	98,48%	116%	117,79	98,50%	117,76
Rata-rata Capaian Kinerja					107,37			

Berdasarkan tabel diatas 4 indikator dari sasaran Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan Dasar, semuanya berhasil melebihi target dengan rata-rata capaian sebesar 107,37 atau dengan interpretasi sangat baik. Meningkatnya persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs, hal ini tak lepas dari peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbiaya rendah bahkan gratis karena sekolah bisa memanfaatkan bantuan Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP) secara tepat guna.

Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi			
1	Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI	72,80	7,53	6,85	72,64	106,04	7,00	103,77
2	Nilai rata-rata Ujian sekolah SMP/MTs	58,30	6,13	7,15	57,36	80,22	7,30	78,57
Rata-rata Capaian Kinerja						93,13		

Berdasarkan tabel diatas sasaran Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator Nilai rata-rata Ujian Sekolah SD/MI dengan capaian sebesar 72,64 dan indikator Nilai rata-rata Ujian Sekolah SMP/MTs dengan capaian sebesar 57,36. Indikator Nilai rata-rata Ujian Sekolah SD/MI berhasil mencapai target, namun tidak dengan Indikator Nilai rata-rata Ujian Sekolah SMP/MTS yang belum berhasil mencapai target. Nilai rata-rata UN SMP/MTs pada tahun ajaran 2017/2018 mengalami penurunan, hal ini

dikarenakan soal-soal UN SMP/MTs diluar prediksi try out dan berdampak pada penurunan nilai rata-rata UN se Jawa Tengah.

Pencapaian target indikator dalam sasaran meningkatnya akses dan ketersediaan layanan pendidikan dasar serta sasaran Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar didukung oleh Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 45.918.979.000,- dan realisasi sebesar Rp.43.661.221.341,- (95,44%).

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Realisasi 2018
			Satuan	Angka	
1	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas baru SD/MI yang dibangun	Ruang	2	2
		Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs yang dibangun	Ruang	2	2
2	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parker	Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pavingisasi halaman	Sekolah	1	1
		Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pembangunan pagar	Sekolah	5	5
		Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pengadaan tanah	Sekolah	1	1
		Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pembangunan pagar	Sekolah	8	8
		Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan peninggian halaman	Sekolah	3	3
		Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pavingisasi halaman	Sekolah	1	1
3	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah sekolah mendapat bantuan pembangunan ruang ibadah	Sekolah	1	1
		Jumlah KM/WC SD yang dibangun	Unit	12	12
5	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	Ruang	5	5
		Jumlah ruang kelas SD yang direhab	Ruang	2	2
		Jumlah ruang kelas baru AKN yang dibangun	Ruang	2	2
		Jumlah ruang kantor SMP yang direhab	Ruang	1	1
		Jumlah ruang laborat SMP yang direhab	Ruang	1	0
		Jumlah ruang serbaguna SMP yang direhab	Ruang	1	1
6	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	Jumlah cabang lomba dipertandingkan	Lomba	43	14
		Jumlah kegiatan training center	Kegiatan	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Realisasi 2018
			Satuan	Angka	
7	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)	Jumlah ruang kelas SD yang direhab	Ruang	42	42
		Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	Ruang	19	19
		Jumlah KM/WC yang direhab	Unit	18	18
		Jumlah paket pengadaan koleksi buku perpustakaan	paket	19	19
8	Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)	Jumlah sd negeri terfasilitasi FOP	SD	71	71
9	Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta)	Jumlah SD/MI terfasilitasi penyelenggaraan UAS	sekolah	146	147
10	Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri	Jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP	SMP	17	17
11	Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta)	Jumlah SMP/MTs terfasilitasi penyelenggaraan UA Snya	sekolah	37	37
12	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase jumlah sekolah penerima dana BOS	persen	100	100
13	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Jumlah SD penerima dana BOS	sekolah	71	71
14	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Jumlah SMP penerima dana BOS	sekolah	17	17
15	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD	Jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi yang difasilitasi	SD	4	4
16	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP	Jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi yang difasilitasi	SMP	1	1
17	Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs	Sekolah	183	183
18	Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)	Jumlah rehab ruang kelas SMP	Ruang	17	17
		Jumlah pembangunan ruang kelas SMP	Ruang	5	5
		Jumlah rehab KM/WC SMP	Ruang	21	21
		Jumlah pengadaan komputer PC	Paket	5	5
19	Pengadaan komputer SD/SMP	Jumlah pengadaan PC UNBK	Unit	202	202
		Jumlah pengadaan serer UNBK	Unit	7	7
		Jumlah pengadaaan jaringan komputer UNBK	Instalasi	7	4

Pelaksanaan kegiatan pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diitujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Kegiatan stategis pada program ini adalah Penambahan ruang kelas sekolah, Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah dan Fasilitasi Operasional Pendidikan SD dan SMP yang sangat berpengaruh pada meningkatnya APK SD/MI dan SMP/MTs, meningkatnya Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs serta menurunnya angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Kegiatan- kegiatan tersebut secara

langsung berpengaruh pada menurunnya beban masyarakat melalui pendidikan berbiaya rendah bahkan gratis untuk jenjang SD/SMP.

Foto pelaksanaan FOP tahun 2018, salah satunya di SD Negeri Landungsari 1, dana FOP dimanfaatkan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, perbaikan proyektor LCD yang ada di ruang kelas dan perbaikan lantai ruang kelas sekolah.



Foto Fasilitasi Operasional Pendidikan Sekolah di SD Negeri Landungsari 1



Foto Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah di SDN Pabean

Analisis Capaian Sasaran 4 Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi			
1	Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	na	48,76%	47,50%			60,00%	
2	Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%			100%	
Rata-rata Capaian Kinerja								

Berdasarkan tabel diatas sasaran Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan dengan capaian kinerja dan Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan dengan capaian kinerja .

Dengan capaian kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya akses dan ketersediaan layanan PNF berhasil mencapai target dengan rata-rata capaian

Pencapaian target-target dalam sasaran Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF didukung oleh Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp.1.392.135.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.241.364.100,- (89,17%) dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Realisasi 2018
			satuan	Angka	
1	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah peserta pembelajaran keaksaraan	Orang	60	60
2	Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta bintek manajemen PNF	Orang	25	25
3	Try Out ujian kesetaraan	Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti tryout ujian kesetaraan	Lembaga	31	31
4	Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan	Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti ujian kesetaraan	Lembaga	31	31
5	Fasilitasi Penyelenggaraan paket A, B dan C	Jumlah lembaga kejar paket A yang terfasilitasi biaya pendidikan	Lembaga	3	3
		Jumlah lembaga kejar paket B yang terfasilitasi biaya pendidikan	Lembaga	10	10
		Jumlah lembaga kejar paket C yang terfasilitasi biaya pendidikan	Lembaga	19	19
6	Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan	Jumlah sekolah/madrasah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan	Lembaga	146	146

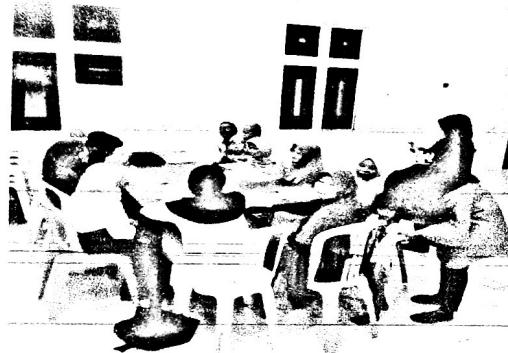
Pelaksanaan kegiatan pada program Pendidikan Non Formal diitujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Kegiatan yang menonjol pada program ini adalah pengembangan pendidikan keaksaraan dan kegiatan Penyelenggaraan Paket A, B dan C .

Kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan bertujuan untuk mengentaskan buta aksara bagi warga usia 15-59 tahun, berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan bersama Kelurahan pada tahun 2018 terdapat 249 penduduk potensi buta aksara yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A,B dan C, berdasarkan Perwal nomor 80 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di

Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan program Paket C Kota Pekalongan,bawa untuk mengentaskan angka putus sekolah dan tidak sekolah dan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, B, dan C Kota Pekalongan diberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di Kota Pekalongan. Bantuan tersebut berupa bantuan biaya pendaftaran program paket A, B sebesar @ Rp.155.000,00 dan paket C Rp. 170.000,00 per warga belajar untuk siswa tahun pelajaran 2018/2019 serta biaya paket pembelajaran program paket A Rp. 3.000,00 ; paket B Rp. 4.000,00 dan paket C Rp. 5.000,00 per warga belajar per pertemuan.

Berikut adalah foto pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan di kelurahan Kandang Panjang dan kegiatan pendidikan kesetaraan di salah satu penyelenggara pendidikan di daerah Poncol.

Kegiatan pendidikan kesetaraan paket A, B, C



Kegiatan pendidikan keaksaraan



Analisis Capaian Sasaran 5

Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi			
1	Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi	55,00%	57,68%	55,05%	55,20%	100,27	57,39%	96,18
Rata-rata Capaian Kinerja						100,27		

Berdasarkan tabel diatas indikator Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi sesuai target Renstra 2016-2021 ditargetkan mencapai 55,05 %. Dari target tersebut tahun 2018 berhasil tercapai sebesar 55,20% dengan capaian kinerja sebesar 100,27% atau interpretasi sangat baik.

Pencapaian target indikator Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi didukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp.19.389.592.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.261.166.900,- (99,34%) dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Realisasi 2018
			Satuan	Angka	
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah peserta PLPG/PPG	Guru	135	135
2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah peserta lulus pre tes PPG	Orang	100	80
3	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	jumlah guru yang difasilitasi mengikuti bintek peningkatan kompetensi	Orang	50	50
4	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah kepala sekolah dinilai kinerjanya	Kepala sekolah	28	28
5	Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT	Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	Orang	1.984	1997
		Jumlah sekolah/madrasah penerima bantuan jasa kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	Sekolah/madrasah	95	94
6	Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi	Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi	Guru/kepala sekolah	18	20
		Jumlah pengawas sekolah terpilih sebagai pengawas sekolah berprestasi	Orang	3	0
7	Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru	Jumlah penerbitan karya ilmiah	kali terbit	2	2
		Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah	Orang	15	15
8	Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula	Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula	Guru	30	1
		Jumlah juknis penilaian induksi guru pemula dan penilaian kinerja guru yang diterbitkan	Dokumen	2	2
9	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru PNS yang disalurkan	Guru	8	3
		Jumlah Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru non PNS yang disalurkan	Guru	100	100

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Realisasi 2018
			Satuan	Angka	
10	Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan	Kasus	12	8
11	Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi	Jumlah cabang lomba pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF	Cabang lomba	7	7
12	Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI	Jumlah KKG SD/MI kelas rendah yang difasilitasi	KKG	12	12
13	Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs	Jumlah anggota Forum MGMP SMP/MTs yang mengikuti workshop dan lokakarya peningkatan pembelajaran	Guru	40	50
14	Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)	Jumlah pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah dan Laporan Program Kepengawasan yang disusun.	Dokumen	2	2
15	Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD dan SMP mengikuti bintek peningkatan kompetensinya	Kepala sekolah	95	50
16	Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinilai angka kreditnya	Guru	200	200

Pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021. Kegiatan yang menonjol dan mendukung tercapainya indikator program adalah Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi dan Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT. Kegiatan tersebut memfasilitasi Pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S1/D4, mengikuti bintek peningkatan kompetensi dan meningkatkan kesejahteraan PTK non PNS/orang/bulan terhadap UMK.

Sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Perlindungan Tahun 2018, bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Pekalongan perlu diberikan Bantuan Penghargaan dan Perlindungan kepada bukan PNS dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kemenag serta Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian bantuan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2018, bahwa untuk meringankan beban pembiayaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam memberikan gaji kepada pendidik dan tenaga kependidikan perlu diberikan bantuan jasa kinerja (Jaskin) dan tenaga kependidikan SD/MI dan SMP/MTs, pemberian Harlindung dan Jaskin memberikan dampak positif terhadap kinerja PTK non PNS dalam memberikan pelayanan

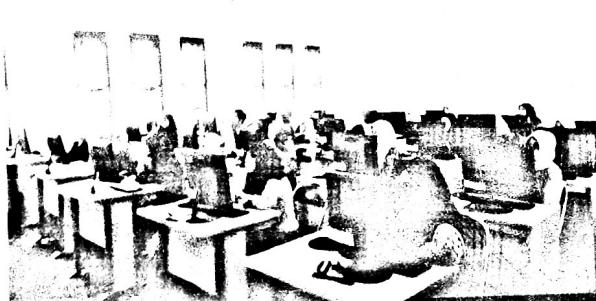
Foto berikut menjelaskan tentang kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan GTT/PTT dimana Sekretaris dinas pendidikan didampingi Kabid PTK dan Kasi PTK SMP memberikan sosialisasi kepada GTT/PTT penerima harlindung; Penyerahan Jasa Kinerja kepada sekolah swasta oleh Walikota Pekalongan sebagai bentuk apresiasi bantuan kepada lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di Kota Pekalongan; Foto Pelaksanaan UKG tahun 2018 di TUK SMA Negeri 3 diikuti 177 guru yang memenuhi kualifikasi dan 59 guru dinyatakan lulus UKG sehingga berhak mengikuti Pendidikan Lanjutan Pendidikan Guru (PLPG) dan. Foto pelatihan pendidik kelas atas terhadap hasil belajar siswa tematik tahun 2018, para guru diberikan sosialisasi tentang penyusunan hasil belajar siswa oleh pendidik kelas atas oleh Kabid PTK dan PTK SMP.



Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan GTT/PTT



Penyerahan Jaskin kepada Sekolah Swasta oleh Walikota Pekalongan



Pelaksanaan UKG di SMAN 3 Kota Pekalongan Tahun 2018



Pelatihan guru kelas atas tahun 2018

Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Mutu Tata Kelola Organisasi

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi			
1	Persentase capaian Kinerja	87,78%	91,67%	80%			80%	
	Rata-rata Capaian Kinerja					100,27		

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2017. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120,76 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 105,53 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 98,52% atau interpretasi sangat baik
Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 110,95 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106,28 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114,59 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111,37 % atau interpretasi Sangat Baik
Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 8 (delapan) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp. 237.009.134.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 201.047.140.622 atau dengan serapan dana APBD mencapai 84,8 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 35.961.993.378 yang sebagian besar merupakan silpa Belanja Tidak Langsung yaitu Rp. 10.188.499.272

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 4 April 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN**

Drs. SOEROSO, M.Pd.

Pembina Tk. I
NIP.19640921 198803 1 007